

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR POS

TGL. PEMBUATAN 01 NOPEMBER 2024 TGL. REVISI 1 TGL. REVISI 2 TGL. EFEKTIF 02 JANUARI 2025 DISAHKAN OLEH SANULTAS NIP 1981/0042008012011

15772/UN22.9/OT.02.00/2024

FAKULTAS KEDOKTERAN

PERINGATAN

Apabila POS ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai arsip elektronik dan manual

		N.	AMA POS	KENAIKAN PANGKAT PNS		
D	ASAR HUKUM	K	UALIFIKASI PEI	LAKSANA		
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	1.	Mengetahui tugas dan fungsi, Sistem dan Prosedur			
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);	2.	Memahami peratura	n terkait kepegawaian		
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);	3.	Mampu mengoperas	ikan komputer dengan baik		
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);					
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);					
6	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);					
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);					
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);					
9	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;					
	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;					
11	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);					
12	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);					
13	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);					
14	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodesasi Kenaikan Pangkan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563).					
K	ETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1.	POS Penyusunan Rencana SKP	1.	Komputer/Laptop/Pr	rinter		
2.	POS Evaluasi Kinerja Pegawai	2.	Jaringan Internet			
3.	POS Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen	3.	Kertas			
	POS Tugas Belajar PNS					
	POS Pengaktifan Kembali Dosen setelah Tugas Belajar					
6.	POS Pencantuman Gelar PNS					

POS KENAIKAN PANGKAT PNS

		Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
No	Kegiatan	PNS	Pengelola Kepegawaian	Tim Verifikasi	Dekan	Bagian Hukum dan Kepegawaian BKU UNTAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkat		Ya				Surat Permohonan kenaikan Pangkat SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan Terakhir SKP 2 Tahun terakhir PAK Konversi Bukti lulus Uji Kompetensi	5 menit	Berkas usulan kenaikan pangkat lengkap	
2	Memeriksa berkas usulan kenaikan pangkat	Tidak		Ya			Berkas usulan kenaikan pangkat lengkap	15 menit	Hasil pemeriksaan Berkas usulan kenaikan pangkat, berkas lengkap	
3	Menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkat ke tim verifikasi fakultas		Tidak	\rightarrow			Hasil pemeriksaan Berkas usulan kenaikan pangkat, berkas lengkap	5 menit	Berkas usulan kenaikan pangkat siap dikirim	
4	Membuatkan surat pengantar berkas usulan kenaikan pangkat						Berkas usulan kenaikan pangkat siap dikirim	30 menit	Berkas usulan kenaikan pangkat dan surat pengantar	
5	Menandatangani surat pengantar berkas usulan kenaikan pangkat						Berkas usulan kenaikan pangkat dan surat pengantar	5 menit	Surat pengantar sudah di tanda tangani secara elektronik dan usulan kenaikan pangkat siap dikirim	
6	Menyampaikan berkas usulan kenaikan pangkat ke Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Keuangan dan Umum Universitas Tanjungpura						Surat pengantar sudah di tanda tangani secara elektronik dan usulan kenaikan pangkat siap dikirim	20 menit	Surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat dikirim	
7	Berkas usulan kenaikan pangkat di terima Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Keuangan dan Umum Universitas Tanjungpura						Surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat dikirim	5 menit	Surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat diterima	
8	Memproses kenaikan pangkat PNS lebih lanjut						Surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat diterima	1 minggu	Usulan kenaikan pangkat dalam proses	
9	Arsip dokumen usulan kenaikan pangkat						Surat pengantar dan usulan kenaikan pangkat	1 minggu	Arsip usulan kenaikan pangkat PNS	